

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021.....	5
2.1.1. Faktor-faktor Penyebab	15
2.1.2. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas PUPR	16
2.1.3. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas PUPR.....	19
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1 Monev Rencana Aksi s.d. Triwulan II.....	5
Tabel 2.1.2 Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan s.d. Triwulan II <i>e-reporting</i>	9
Tabel 3.2.1 Usulan perubahan penyesuaian prioritas kebutuhan.....	21
Tabel 3.3.1 Matriks Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD). Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi tahun 2017 – 2022. Perubahan dalam Renja Tahun 2021 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Perubahan Renja Tahun 2021 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun 2021, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kondisi di lapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat.

2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program kota.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2021 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 13 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 - 14 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
 - 15 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 - 16 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas PUPR Tahun 2021 adalah :

- sebagai pemenuhan dokumen wajib juga sebagai acuan resmi bagi SKPD dalam Menyusun program dan kegiatan serta menentukan prioritas program tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cimahi dan atau APBD Provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2021 diantaranya adalah :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kota Cimahi.

- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui Forum SKPD, serta implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar SKPD, serta antar sektor pembangunan sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah;
- Sebagai pedoman perencanaan tahunan secara resmi dan menyediakan parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN, yg terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan;
- BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021, berupa narasi dan matrik dari hasil moneyv TW II;
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berupa matriks yang telah di input ke SIPD;
- BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa:
 - a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
 - c. Rencana tindak lanjut;
- Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi semester yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan tabel monitoring dan evaluasi rencana aksi Dinas PUPR sampai dengan Triwulan III.

Tabel 2.1.1 Monev Rencana Aksi s.d. TW II

SASARAN STRATEGIS			TARGET s.d.				REALISASI				CAPAIAN KINERJA (%)				TARGET				REALISASI				CAPAIAN KINERJA (%)				KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Urutan	Indikator Kinerja	Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Memanggotnya kegiatan pembinaan terhadap rencana tata ruang	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kota	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kota	62%	61,25%	61,00%	60,00%	59,00%	58,00%	57,00%	56,00%	55,00%	54,00%	53,00%	52,00%	51,00%	50,00%	49,00%	48,00%	47,00%	46,00%	45,00%	44,00%	43,00%	42,00%	41,00%	40,00%	39,00%	38,00%	37,00%	36,00%	35,00%	34,00%	33,00%	32,00%	31,00%	30,00%	29,00%	28,00%	27,00%	26,00%	25,00%	24,00%	23,00%	22,00%	21,00%	20,00%	19,00%	18,00%	17,00%	16,00%	15,00%	14,00%	13,00%	12,00%	11,00%	10,00%	9,00%	8,00%	7,00%	6,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0

SASARAN STRATEGIS		TARGET s.d.				REALISASI				CAPAIAN KINERJA (%)				KET
Urutan	Indikator Kinerja	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Administrasi Umum dan Pengaduan Daerah													
	Sub Kegiatan													
	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Barang Logistik Kantor													
	Penyediaan Barang Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
2	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
3	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

Tabel 2.1.2 Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan s.d. TW II

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH / BAGIAN : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BULAN JUNI TAHUN 2021

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN	FISIK (%)	KEUANGAN			
								Rp.	%		
1	KPA :MOHAMAD SUTARNO, ST										
	PPTK: ENDANG ROHENDI, S.H.										
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.424.932.700,00	59,63	849.706.050,00	59,63	53,48	591.997.631,00	69,67	41,55
		1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28.700.000,00	100,00	28.700.000,00	100,00	100,00	27.300.000,00	95,12	95,12
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.411.800,00	68,58	84.636.650,00	68,58	68,58	75.014.800,00	88,63	60,78
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.456.300,00	49,96	86.160.000,00	49,96	49,96	63.767.100,00	74,01	36,98
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.060.400,00	52,35	11.025.200,00	52,35	52,35	10.142.800,00	92,00	48,16
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	50,00	12.000.000,00	50,00	50,00	12.000.000,00	100,00	50,00
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	42,40	42.400.000,00	42,40	39,60	28.710.029,00	67,71	28,71
		7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.440.000,00	50,00	42.720.000,00	50,00	50,00	39.716.124,00	92,97	46,48
		8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	50,00	18.000.000,00	50,00	50,00	3.037.924,00	16,88	8,44
		9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.150.600,00	50,20	54.790.600,00	50,20	49,97	51.676.624,00	94,32	47,34
		10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560.090.000,00	54,39	304.650.000,00	54,39	52,68	192.132.230,00	63,07	34,30
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.623.600,00	100,00	164.623.600,00	100,00	54,44	88.500.000,00	53,76	53,76 Kegiatan ditunda terlebih dahulu
	PPTK: RENNA YUSTIA RACHMAT, S.E.										
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.055.543.500,00	53,10	4.277.876.878,00	53,10	53,10	3.494.766.529,00	81,69	43,38
		12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.279.800,00	66,94	55.078.800,00	66,94	66,94	42.512.062,00	77,18	51,67
		13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100,00	100,00	3.375.000,00	75,00	75,00
		14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.920.044.000,00	52,95	4.193.949.778,00	52,95	52,95	3.427.086.405,00	81,72	43,27

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			
						Rp.	%		Rp.			% terhadap Rencana
1	KPA : MOHAMAD SUTARNO, ST											
	PPTK: RENNA YUSTIA RACHMAT, S.E.											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.055.543.500,00	53,10	4.277.876.878,00	53,10	53,10	3.494.766.529,00	81,69	43,38	
		15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.900,00	49,35	493.500,00	49,35	50,00	385.000,00	78,01	38,50	
		16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47.719.800,00	49,99	23.854.800,00	49,99	49,99	21.408.062,00	89,74	44,86	
2	KPA : DENI HERDIANI, S.T.											
	PPTK : HENDRA GUNAWAN, S.T.											
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.491.800,00	51,11	2.295.900,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4.491.800,00	51,11	2.295.900,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	192.000.000,00	89,25	171.360.000,00	89,25	9,38	18.232.738,00	10,64	9,50	
		18	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	22.000.000,00	100,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60.000.000,00	65,60	39.360.000,00	65,60	30,02	18.232.738,00	46,32	30,39	
		21	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PPTK : RADEN RATNA SOFISTIA (DFA), S.T., MAP											
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	60.138.552.420,00	22,27	13.392.088.370,00	22,27	0,78	28.964.300,00	0,22	0,05	
		22	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	60.138.552.420,00	22,27	13.392.088.370,00	22,27	0,78	28.964.300,00	0,22	0,05	
											Uang Muka MK 20%	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana		
2	KPA : DENI HERDIANI, S.T.											
	PPTK : RIAN HERDIANA, S.T.											
		23	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Pemberitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	450.000.000,00 450.000.000,00	73,52 73,52	330.859.000,00 330.859.000,00	73,52 73,52	2,77 2,77	11.989.000,00 11.989.000,00	3,62 3,62	2,66 2,66	
3	KPA : WILMAN SUGIANSYAH, S.T., M.E.											
	PPTK : I MADE WARDANA, S.T.											
		24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Pelebaran Jalan Menuju Standar	111.279.999.700,00 1.012.000.000,00	62,81 50,00	34.997.290.000,00 505.970.000,00	31,45 50,00	0,02 0,34	18.087.450,00 3.465.100,00	0,05 0,68	0,02 0,34	Kegiatan diaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV
		25	Pembangunan Underpass	109.246.399.500,00	63,24	34.185.580.000,00	31,29	0,01	9.674.200,00	0,03	0,01	Kegiatan diaksanakan sesuai dengan rencana, Pembangunan Underpass mulai diaksanakan pada Triwulan III Bulan Juli Tahun 2021
		26	Penggantian Jembatan	1.021.600.200,00	29,93	305.740.000,00	29,93	0,56	4.948.150,00	1,62	0,48	Kegiatan diaksanakan Pada Triwulan III Bulan Juli Tahun 2021

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
3	KPA : WILMAN SUGIANSYAH, S.T., M.E. PPTK: FITRIYADI, S.T., M.Eng												
		27	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Pemeliharaan Berkala Jalan	34.194.309.153,00 30.058.964.100,00	54,81 55,73	12.034.404.400,00 10.043.220.000,00	35,19 33,41	1.601.559.188,00 982.369.300,00	13,31 9,78	4,68 3,27		Kegiatan Pekerjaan Fisik dilaksanakan pada Triwulan III	
		28	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.323.432.553,00	35,67	1.185.304.400,00	35,67	615.793.188,00	51,95	18,53	Tidak ada Kendala	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	
		29	Pemeliharaan Berkala Jembatan	811.912.500,00	99,26	805.880.000,00	99,26	3.396.700,00	0,42	0,42			
	PPTK: RIAN HERDIANA, S.T.												
		30	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Pengelolaan Leger Jalan	474.958.400,00 309.998.600,00	33,95 1,45	161.250.000,00 4.500.000,00	33,95 1,45	54.472.900,00 3.141.600,00	33,78 69,81	11,47 1,01	Pekerjaan Leger Jalan Dilaksanakan Belum Dilaksanakan IV	Updating Leger Jalan Dilaksanakan pada Triwulan IV	
		31	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	164.959.800,00	95,02	156.750.000,00	95,02	51.331.300,00	32,75	31,12	Tidak ada kendala	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	
4	KPA : AMY PRINGGO MARDHANI, S.T.,M.T.												
	PPTK: R. DEWI MARTIATI S. S.T., MAP												
		32	Sistem Informasi Penataan Ruang	845.657.600,00 98.000.000,00	30,08 0,00	254.390.200,00 0,00	30,08 0,00	157.485.186,00 0,00	61,91 100,00	18,62 0,00	Tidak ada kendala	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana		
4	KPA : AMY PRINGGO MARDHANI, S.T., M.T.											
	PPTK : R. DEWI MARTIATI S. S.T., MAP											
		33	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	845.657.600,00	30,08	254.390.200,00	30,08	21,28	157.485.186,00	61,91	18,62	
				495.500.000,00	24,42	121.015.700,00	24,42	19,86	82.389.000,00	68,08	16,63	Pekerjaan akan dilaksanakan setelah Peraturan Menteri disahkan
		34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	57.100.000,00	93,70	53.500.000,00	93,70	3,07	1.750.000,00	3,27	3,06	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III menunggu perubahan
		35	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	195.057.600,00	40,95	79.874.500,00	40,95	40,90	73.346.186,00	91,83	37,60	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana
	PPTK : EKA PURWANA SYAHRONI, S.T.											
		36	Pelaksanaan Persetujuan Subsistensi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	405.902.400,00	63,89	259.314.000,00	63,89	52,35	190.728.000,00	73,55	46,99	
				50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	100,00	49.818.000,00	99,64	99,64	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
4	KPA : AMY PRINGGO MARDHANI, S.T., M.T. PPTK : EKA PURWANA SYAHRONI, S.T.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	405.902.400,00	63,89	259.314.000,00	63,89	52,35	190.728.000,00	73,55	46,99		
		37	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	187.000.000,00	74,79	139.850.000,00	74,79	74,78	118.690.000,00	84,87	63,47	Kegiatan akan dilaksanakan kembali setelah adanya kejelasan terhadap pelaksanaan FPR	
		38	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	100,00	19.900.000,00	99,50	99,50	Tidak ada kendala	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana
		39	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	48.902.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Tidak ada kendala	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana
		40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49,46	24.732.000,00	49,46	2,66	1.160.000,00	4,69	2,32	Tidak ada kendala	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana
		41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49,46	24.732.000,00	49,46	2,66	1.160.000,00	4,69	2,32	Tidak ada kendala	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana
	Total/Rata-rata			217.466.347.673,00	49,82	66.730.834.798,00	30,69	3,73	6.168.282.922,00	9,24	2,84		

2.1.1. Faktor-faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang baik dari segi fisik maupun anggaran.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan TA 2021 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yakni:

- a. Penempatan kode rekening belanja belum tepat diantaranya pekerjaan hibah Rehabilitasi Gedung Pusdikpom dan Rehabilitasi Gedung Kodim sehingga harus diubah di ABT.
- b. Dibubarkannya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Barat sehingga mengakibatkan tertundanya Sertifikasi Tenaga Terampil pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
- c. Kegiatan Pekerjaan Fisik pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi masih dalam proses tender :
 1. Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor/Mal Pelayanan Publik Tahap II sedang dalam Tahap Masa Sanggah setelah dilakukannya evaluasi ulang oleh Pokja Pemilihan Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
 2. Pekerjaan Penyempurnaan Masjid Pemkot Cimahi dalam Tahap Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 3. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Pemkot Cimahi (A, B, dan C) dalam Tahap Perencanaan.
- d. Waktu pelaksanaan tidak mencukupi
- e. Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.
- f. Ketidakpastian fungsi bangunan gedung RDKC sehingga menyebabkan tidak jadi dilaksanakan pekerjaan konstruksi dan pengawasan terhadap bangunan tersebut, yang kemudian anggaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan rehabilitasi gedung RDKC dialihkan kepada pekerjaan belanja hibah Lanjutan Sarana dan Prasarana Kejari (pekerjaan konstruksi dan pengawasan). Sedangkan untuk anggaran perencanaan Pekerjaan Lanjutan Sarana dan Prasarana Kejari dilakukan pergeseran anggaran dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG ke Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

- g. Diperlukan Tenaga Harian Lepas (THL) untuk keamanan di kawasan Pembangunan Kantor/Mal Pelayanan Publik.
- h. Kondisi pandemi covid-19 yang terus meningkat sampai dengan triwulan II, sehingga terdapat kegiatan konsultasi kajian yang berbasis survey ke lapangan tidak dapat dilaksanakan.
- i. Berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU no 11 tahun 2020 dan Peraturan turunannya berupa PP dan Permen yang mengubah sistem dan mekanisme perizinan di Kota Cimahi yang harus difasilitasi.

2.1.2. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas PUPR

Implikasi yang timbul akibat adanya pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan:

- a. Target kapasitas jalan dan jembatan tidak terpenuhi
- b. Kondisi jalan dan jembatan akan semakin rusak
- c. Tidak ada Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi.
- d. Pekerjaan Pembangunan mengalami keterlambatan.
- e. Bergesernya target yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

2.1.3. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terkait tersebut yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Perubahan rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kondisi.
- b. Pergeseran anggaran kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- c. Dilakukannya Sosialisasi Tenaga Terampil yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan November 2021. Sehingga Sertifikasi Tenaga Terampil dapat dilakukan setelah adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- d. Percepatan dalam pelaksanaan pembangunan.
- e. Penentuan kode rekening belanja hibah terhadap pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Puskopom dan Rehabilitasi Bangunan Kodim.
- f. Dilakukan pergeseran anggaran belanja modal Pekerjaan Fisik dan Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Gedung RDKC menjadi belanja hibah Pekerjaan Lanjutan Sarana dan Prasarana Kejari.

Pergeseran anggaran dari Sub Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota ke Sub Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi untuk Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 2 orang.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas PUPR Kota Cimahi harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusianya masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mengembangkan sektor fisik sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dapat tercapai, guna mendorong pemerataan pembangunan, tidak sebatas melayani kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi meningkatkan faktor keselamatan, kenyamanan, kemudahan masyarakat dalam melakukan kehidupan sosialnya.

b. Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih sertamenjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagipembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangkamenengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, makaditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi JawaBarat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Kota Cimahi dalam kebijakan Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus Cekungan Bandung. Daerah yang termasuk WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan). Fokus pengembangan WP Cekungan Bandung adalah pada sektor pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan. Untuk Kota Cimahi sendiri termasuk dalam kawasan inti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dengan pengembangan yang berfokus pada kegiatan Perdagangan dan jasa, Industri kreatif dan *high tech*. Selain termasuk dalam WP Cekungan Bandung sebagian wilayah Kota Cimahi juga ditentukan menjadi bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Wilayah Kota Cimahi yang berada di garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut (mdpl) ke Utara ditentukan menjadi bagian dari KBU yang dikendalikan kebijakan pola ruang, zonasi, dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dualisme kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Cimahi harus disikapi secara bijak. Di salah satu sisi Kota Cimahi dikembangkan menjadi daerah strategis untuk perdagangan dan jasa, industri kreatif dan *high tech* tetapi di sisi

lain terdapat pembatasan pemanfaatan lahan di KBU. Kebijakan penataan ruang Kota Cimahi harus dapat mengakomodasi dua kebijakan tersebut dengan baik dan seimbang tanpa harus mengorbankan salah satunya.

Berubahnya peraturan perundang-undangan yang mulai berlaku efektif pada bulan Agustus, menyebabkan terjadinya perubahan sistem, mekanisme perizinan pembangunan di Kota Cimahi yang berdampak terhadap rencana dan kegiatan anggaran di tahun 2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Cimahi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah memenuhi kebutuhan akan target capaian dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi, dimana Visi Kota **"MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA"**, dan Misi Kota Cimahi 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik.
3. Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang berorientasi pada penembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dinas PUPR Kota Cimahi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah khususnya bidang fisik/infrastruktur mempunyai tujuan diantaranya :

1. Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah kota
3. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang

Sasaran :

1. Meningkatnya kemantapan jalan kota
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Rancangan Awal Renstra Dinas PUPR

2017-2022 dan penyesuaian tambahan belanja untuk kebutuhan prioritas yang muncul di tahun berjalan.

Berikut tabel beberapa usulan perubahan yang menjadi prioritas kebutuhan sebagai penyesuaian di Sekretariat dan Bidang-Bidang.

Tabel 3.2.1 Usulan Perubahan penyesuaian prioritas kebutuhan Sekretariat

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/berkurang
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.1.02.02.01.0003	Narasumber/ Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	4.200.000	2.800.000	- 1.400.000
			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	49.394.300	52.826.100	3.431.800
	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.020.000	11.598.200	2.578.200
			5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	-	12.185.700	12.185.700
			5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	-	267.600.000	267.600.000
			5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	-	64.608.900	64.608.900
			5.2.02.10.01.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	12.094.880	12.094.880
			5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	19.412.400	26.703.200	7.290.800
		1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	82.640.000	122.186.000	39.546.000
	1.03.01.2.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.360.000	20.400.000	3.040.000
			5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan	6.720.000	10.080.000	3.360.000
			5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	42.193.700	-	42.193.700
		1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.508.300	-	5.508.300
			5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan	2.501.600	-	2.501.600
	1.03.01.2.08 Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.795.000	-	24.795.000
			5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.030.600	31.030.600	3.000.000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/ berkurang
	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaawa Acara, dan Panitia	6.200.000	1.400.000	- 4.800.000
				Belanja Jasa Penyelenggara Acara	7.500.000	3.750.000	- 3.750.000

Bidang Tata Ruang

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN	SEMULA	MENJADI	SELISIH	KET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				Rp 20.000.000	Rp 134.852.000	Rp 114.852.000	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 600.000	Rp 3.104.000	Rp 2.504.000	Penambahan operasional proses PKKPR
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp 19.400.000	Rp 93.000.000	Rp 73.600.000	Penambahan Honorarium Tenaga Ahli untuk RTRW dan RDTR
			Penyusunan Peta Tematik		Rp 38.748.000	Rp 38.748.000	persiapan untuk RDTR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp 495.500.000	Rp 380.648.000	Rp (114.852.000)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 24.200.000	Rp 25.345.420	Rp 1.145.420	Pengurangan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang digeser untuk penambahan kegiatan pengawasan
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp 36.800.000	Rp 55.200.000	Rp 18.400.000	Penambahan Honorarium Tenaga Ahli untuk Pengawasan

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN	SEMULA	MENJADI	SELISIH	KET
		5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Rp 220.000.000	0	Rp (220.000.000)	Pekerjaan Audit Tata Ruang tidak dilaksanakan karena Audit Tata Ruang sebelumnya dirasa masih dapat dipakai dan belum urgent untuk dilaksanakan tahun ini, dan proses pelaksanaan yang mengharuskan dilakukan survey ke lapangan, mengingat kondisi pandemic tidak dapat maksimal dilakukan.
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 16.500.000	Rp 3.000.000	Rp (13.500.000)	Peniadaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang
		5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp 6.000.000	Rp -	Rp (6.000.000)	Peniadaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang
			Penyusunan Kajian Tentang KKPR dan FPR		Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Persiapan Pelaksanaan kegiatan penerbitan KKPR dan Pembentukan FPR
			Pengadaan perangkat komputer		Rp 65.102.580	Rp 65.102.580	Pengadaan utk Proses Sistem OSS/KKPR dan pengendalian

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Harga	Menjadi		
						Koefisien	Harga	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, dan Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.02.5.1.0	Narasumber Instansi Vertikal Tingkat Kota	8 Orang x 2 kegiatan x 9 bulan	288.000.000	15 Orang x 2 Hari x 4 bulan	254.000.000	
		2.02.01.0006	Honorarium					
			Penyuluhan atau Pendampingan					
		Total :				288.000.000		254.000.000
				Tenaga Harian Lepas	1 Orang x 24 hari x 12 bulan	38.880.000	3 Orang x 24 Hari x 12 bulan	55.080.000
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.04.5.1.0	Asuransi Kesehatan	1 Orang/Bulan x 12 Bulan	1.800.000	3 Orang/Bulan x 12 Bulan	2.400.000	
		2.02.01.0028 Belanja Jasa tenaga						
		1.03.11.2.01.04.5.1.0						
		2.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						
		Total :				41.280.000		58.280.000

Bidang Bina Marga

Program /Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN / Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Penilai (Penaksir Harga) Tanah	50.000.000	50.000.000	-	(50.000.000)
		5.2.01.01.03.0007	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Radius Tikung Jl. Industri	450.000.000	450.000.000	-	(450.000.000)
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Total :		500.000.000	500.000.000	-	(500.000.000)
		5.1.02.02.08.0006	Perencanaan Teknis Jalan Kota I (ABT TA. 2021)	-	-	100.000.000	100.000.000
		5.1.02.02.08.0020	Pengawasan Teknis Jalan Kota I (ABT TA. 2021)	-	-	100.000.000	100.000.000
		5.1.02.03.04.0010	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Melong VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Melong IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Melong X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Leuwigajah VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Leuwigajah IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Leuwigajah X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Utama VII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Utama VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibeber VIII	-	-	150.000.000	150.000.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibeber IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibeureum VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibeureum IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibeureum X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Karangmekar IV	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Karangmekar V	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Karangmekar VI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Karangmekar VII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Setiamanah VII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Setiamanah VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Padasuka VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Padasuka IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cigugur Tengah VI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cigugur Tengah VII	-	-	150.000.000	150.000.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Baros VI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Baros VII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Baros VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Baros IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibabat X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibabat XI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cipageran IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cipageran X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cipageran XI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cipageran XII	-	-	151.389.000	151.389.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasirkaliki VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasirkaliki IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Citeureup VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Citeureup IX	-	-	150.000.000	150.000.000
		5.2.02.01.06.0016	Meteran Gulung 50m	-	-	295.200	295.200
		5.2.04.01.01.0004	Pemeliharaan Berkala Jalan Cigugur (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
			Pemeliharaan Berkala Jalan Encep Kartawiria (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Kihapit Barat (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Cikendal (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Kamarung (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Kihapit Timur (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Total :	-	-	7.151.684.200	7.151.684.200
		5.1.02.01.01.0001	Alat Bantu lapangan	-	-	200.000.000	200.000.000
		5.1.02.02.12.0001	Workshop Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	-	-	200.000.000	200.000.000
		5.2.02.01.03.0016	Rak Kabinet untuk Gudang Arsip	-	-	100.000.000	100.000.000
	Pembangunan Underpass		Total :	-	-	500.000.000	500.000.000
		5.1.02.02.01.0006	Pendampingan Hukum Pelaksanaan Kegiatan yang Berpotensi Berimplikasi Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara	480.000.000	480.000.000	264.000.000	(216.000.000)
		5.1.02.01.01.0052	Jamuan Makan Nasi Box	12.425.000	12.425.000	19.425.000	7.000.000
			Snack Box	7.575.000	7.575.000	10.575.000	3.000.000
		5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Lahan Milik PT. KAI untuk Pembangunan Underpass Jl. Dustira - Jl. Sriwijaya	1.125.000.000	1.125.000.000	1.170.396.038	45.396.038
		5.1.02.02.08.0019	Monitoring dan Evaluasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	1.478.000.000	1.274.000.000	102.000.000	(1.172.000.000)

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
		5.2.04.01.01.0004	Pengawasan PT. KAI untuk Pembangunan Underpass Jl. Dustira - Jl. Sriwijaya	1.125.000.000	1.125.000.000	321.611.000	(803.389.000)
			Kompensasi Penebangan Pohon Pembangunan Underpass Sriwijaya Kel. BAROS, Kec. CIMAHI TENGAH, Kota Cimahi	-	-	231.992.962	231.992.962
		Total :		4.228.000.000	4.024.000.000	2.120.000.000	(1.904.000.000)
	Penggantian Jembatan	5.1.02.01.01.0001	Pelebaran Jembatan Cipeujeuh	450.000.000	450.000.000	-	(450.000.000)
			Penggantian Jembatan Ciawitali	450.000.000	450.000.000	-	(450.000.000)
		5.1.02.02.08.0006	Perencanaan Jembatan Penyebrangan Orang Jalan Sriwijaya	-	-	50.000.000	50.000.000
		5.1.02.02.08.0019	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan TA 2021	75.000.000	75.000.000	-	(75.000.000)
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Total :		975.000.000	975.000.000	50.000.000	(925.000.000)
		5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan (Belanja Sewa Tanah)	800.000.000	800.000.000	512.325.000	(287.675.000)
		5.1.02.02.08.0020	Pengawasan Operasional Kemanan Jalur Kereta Api	-	-	412.500.000	412.500.000
		Total :		800.000.000	800.000.000	924.825.000	124.825.000
	TOTAL:			6.503.000.000	6.299.000.000	10.746.509.200	4.447.509.200

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Seiring pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan yang mengalami penambahan anggaran dari Dana Bantuan Provinsi yang diwujudkan pada Dokumen Anggaran Parsial serta optimalisasi anggaran di beberapa kode rekening belanja maka hal tersebut disertakan pada perubahan rencana kerja.

Dengan penambahan dana baik dari APBD Kota maupun yang berasal dari luar APBD Kota serta beberapa usulan perubahan tersebut berikut disampaikan matriks perubahan rencana kerja beserta indikatornya.

Berikut tabel Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 :

TABEL 3.3.1 MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PUPR
KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Tahun 2022	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Murni)	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														33.032.266.842
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														9.617.371.872
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														71.779.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran, Jumlah dokumen perencanaan, Pelaksanaan Forum SKPD	Jumlah dokumen anggaran, Jumlah dokumen perencanaan, Pelaksanaan Forum SKPD	Kota Cimahi	Kota Cimahi	6 dokumen, 1 kegiatan	6 dokumen, 1 kegiatan	82.279.800	73.729.800	APBD Kota	APBD Kota				67.279.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD	Jumlah dokumen evaluasi PD	Kota Cimahi	Kota Cimahi	3 dokumen	3 dokumen	4.500.000	4.500.000	APBD Kota	APBD Kota				4.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Tunjangan Transportasi ASN	Pembayaran Gaji ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Tunjangan Transportasi ASN	Kota Cimahi	Kota Cimahi	14 bulan, 11 bulan, 12 bulan	14 bulan, 11 bulan, 12 bulan	7.968.763.700	7.968.763.700	APBD Kota	APBD Kota				8.310.665.372
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 dokumen	2 dokumen	999.900	999.900	APBD Kota	APBD Kota				999.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 dokumen	12 dokumen	47.719.800	47.719.800	APBD Kota	APBD Kota				47.719.800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi pegawai non ASN	Jumlah kegiatan sosialisasi pegawai non ASN	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.700.000	27.300.000	APBD Kota	APBD Kota				17.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan ATK, Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan Penyediaan ATK, Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan, 6 set	12 bulan, 9 set	123.411.800	543.155.280	APBD Kota	APBD Kota				336.600.700 49.949.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan natura, Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah bulan penyediaan natura, Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	172.456.300	175.816.300	APBD Kota	APBD Kota				73.949.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan cetak dan penggandaan	Jumlah bulan cetak dan penggandaan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	21.060.400	28.351.200	APBD Kota	APBD Kota				13.741.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan aturan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan aturan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	24.000.000	24.000.000	APBD Kota	APBD Kota				24.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	100.000.000	142.586.000	APBD Kota	APBD Kota				174.960.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							230.590.600	233.590.600						221.317.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Tahun 2022	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Murni)	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Caraka	Caraka	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	85.440.000	85.440.000	APBD Kota	APBD Kota		85.440.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	36.000.000	36.000.000	APBD Kota	APBD Kota		36.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan kebersihan kantor	Jumlah bulan kebersihan kantor	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	109.150.600	112.150.600	APBD Kota	APBD Kota		99.877.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							724.713.600	649.715.000				659.515.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlitan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	560.090.000	560.090.000	APBD Kota	APBD Kota		569.890.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pengerjaan pemeliharaan kantor, Jumlah Bulan Sewa Gudang	Jumlah bulan pengerjaan pemeliharaan kantor, Jumlah Bulan Sewa Gudang	Kota Cimahi	Kota Cimahi	1 bulan, 12 bulan	0 bulan, 12 bulan	164.623.600	89.625.000	APBD Kota	APBD Kota		89.625.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							60.593.044.220	60.859.954.120				4.516.715.670
								60.593.044.220	60.859.954.120				4.516.715.670
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Bangunan Gedung Pemerintah yang Bersertifikat Laik Fungsi	Terkajinya kelaikan fungsi Gedung Pemerintah	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Gedung	2 Gedung	450.000.000	627.930.000	APBD Kota	APBD Kota	2 Gedung	1.000.000.000
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi bangunan pemerintah untuk Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah verifikasi bangunan pemerintah untuk Sertifikat Laik Fungsi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Gedung	2 Gedung	60.138.552.420	60.138.552.420	APBD Kota	APBD Kota		3.416.715.670
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Pemerintah yang Bersertifikat Laik Fungsi	Bangunan Gedung Pemerintah yang Bersertifikat Laik Fungsi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Gedung	2 Gedung	4.491.800	93.471.700	APBD Kota	APBD Kota	2 Gedung	100.000.000
	PROGRAM PENWELANGGAAN JALAN												
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							39.949.267.253	151.585.645.053				17.141.653.300
	Pengelolaan Leger Jalan	1. Jumlah Laporan Pemutakhiran Leger Jalan Drainase dan Trotoar : 3 Dokumen 2. Sistem Informasi Leger Jalan Drainase dan Trotoar : 2 Dokumen	1. Jumlah Laporan Pemutakhiran Leger Jalan Drainase dan Trotoar : 3 Dokumen 2. Sistem Informasi Leger Jalan Drainase dan Trotoar : 2 Dokumen	Kota Cimahi	Kota Cimahi			309.998.600	309.998.600	APBD Kota	APBD Kota		311.959.800

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Tahun 2022	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kerja				Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Murni)	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1. Jumlah Hari Survey : 30 hari 2. Jumlah Lokasi Jembatan yang Disurvey : 29 Lokasi 3. Jumlah Ruas Jalan yang Disurvey : 108 Ruas	1. Jumlah Hari Survey : 30 hari 2. Jumlah Lokasi Jembatan yang Disurvey : 29 Lokasi 3. Jumlah Ruas Jalan yang Disurvey : 108 Ruas	Kota Cimahi	Kota Cimahi			164.959.800	164.959.800	APBD Kota	APBD Kota		500.000.000
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1. Jumlah Dokumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dokumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Ruas Jalan yang Dilebarkan : 1 ruas	1. Jumlah Dokumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dokumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Ruas Jalan yang Dilebarkan : 1 ruas	Kota Cimahi	Kota Cimahi			1.012.000.000	512.000.000	APBD Kota	APBD Kota		500.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	1. Jumlah Dokumen DED : 16 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Pengawasan : 24 dokumen 3. Jumlah Ruas Jalan yang Dipelihara : 74 ruas 4. Luas Trotoar : 200 m ² 5. Panjang Drainase : 1000 m	1. Jumlah Dokumen DED : 13 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Pengawasan : 15 dokumen 3. Jumlah Ruas Jalan yang Dipelihara : 39 ruas 4. Jumlah Ruas Jalan Lingkuangan yang Dipelihara : 99 ruas 5. Luas Trotoar : 200 m ² 6. Panjang Drainase : 1000 m	Kota Cimahi	Kota Cimahi	% Kondisi Jalan dan jembatan yang Mantap : 94,5%		29.058.964.100	38.048.127.900	APBD Kota, DAK, DID	APBD Kota, DAK, DID		10.429.990.500
	Pemeliharaan Rutin Jalan	1. Jumlah Ruas yang Dipelihara : 40 ruas	1. Jumlah Ruas yang Dipelihara : 40 ruas	Kota Cimahi	Kota Cimahi			3.323.432.553	3.473.432.553	APBD Kota	APBD Kota		3.382.706.000
	Pembangunan Underpass	1. Jumlah Dokumen Pengawasan : 1 dokumen 2. Panjang Pembangunan Jalan Underpass : 0,85 km 3. Sewa lahan : 5 tahun	1. Jumlah Dokumen Pengawasan : 1 dokumen 2. Panjang Pembangunan Jalan Underpass : 0,63 km 3. Sewa lahan : 5 tahun	Kota Cimahi	Kota Cimahi			4.246.399.500	108.043.788.500	APBD Kota	APBD Kota, APBD Prov.		1.000.000.000
	Penggantian Jembatan	1. Jumlah Dokumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dokumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Jembatan yang Dipelihara : 2 Jembatan	1. Jumlah Dokumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dokumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Jembatan yang Dipelihara : 2 Jembatan	Kota Cimahi	Kota Cimahi			1.021.600.200	96.600.200	APBD Kota	APBD Kota		-
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1. Jumlah Ruas Jembatan yang Dipelihara 2. Sewa Lahan	1. Jumlah Ruas Jembatan yang Dipelihara 2. Sewa Lahan	Kota Cimahi	Kota Cimahi			811.912.500	936.737.500	APBD Kota	APBD Kota		1.016.997.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Tahun 2022	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi			Target Capaian Kerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Murni)	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					192.000.000			192.000.000	92.000.000			192.000.000
	Penyediaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersertifikasinya Tenaga Terampil Konstruksi	-	Kota Cimahi	0 Orang	15 Orang			192.000.000	92.000.000	APBD Kota		15 Orang
	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Tersertifikasinya Tenaga Terampil Konstruksi	Tersosialisasinya Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Cimahi	100 Orang	100 Orang			22.000.000	22.000.000	APBD Kota		100 Orang
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersertifikasinya Tenaga Terampil Konstruksi	Tersosialisasinya Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Cimahi	100 Orang	100 Orang			60.000.000	70.000.000	APBD Kota		100 Orang
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersertifikasinya Tenaga Terampil Konstruksi	-	Kota Cimahi	0 Orang	100 Orang			60.000.000		APBD Kota		100 Orang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.251.560.000			1.251.560.000	1.186.457.420			1.564.520.000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota					305.902.400			305.902.400	423.999.820			801.400.000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan RTRW	Jumlah dokumen kebijakan RTRW yang direview	Kota Cimahi	1 dokumen	1 dokumen			50.000.000	50.000.000	APBD Kota		50.000.000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan RTRW yang direview	Jumlah dokumen kebijakan RTRR yang direview	Kota Cimahi	1 dokumen	1 dokumen			187.000.000	187.000.000	APBD Kota		300.000.000
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan RTRW yang ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan RTRR dan RTRW yang ditetapkan	Kota Cimahi	1 dokumen	1 dokumen			20.000.000	138.097.420	APBD Kota		391.400.000
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi	Kota Cimahi	1 dokumen	1 dokumen			48.902.400	48.902.400	APBD Kota		60.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan RTRW	Jumlah dokumen kebijakan RTRW dan sinkronisasi RTRW	Kota Cimahi	3 laporan 3 kali	3 laporan 3 kali			100.000.000	100.000.000			26.400.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi RTRR	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi RTRR	Kota Cimahi	3 kali 3 laporan	3 kali 3 laporan			50.000.000	50.000.000	APBD Kota		13.200.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah	Pemutakhiran data dalam SIMTARU dalam setahun	Pemutakhiran data dalam SIMTARU dalam setahun	Kota Cimahi	1 SI	1 SI			98.000.000	98.000.000	APBD Kota		265.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								747.657.600	564.457.600			471.720.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah APH Kegiatan Penyerahan PSU	Jumlah APH Kegiatan Penyerahan PSU	Kota Cimahi	8 Orang	8 Orang			495.500.000	312.300.000	APBD Kota		245.000.000
		Jumlah Bulan Pelaksanaan APH Kegiatan Penyerahan PSU	Jumlah Bulan Pelaksanaan APH Kegiatan Penyerahan PSU	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Tahun 2022	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Murni)	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
		Jumlah dokumen audit tata ruang	Jumlah dokumen kajian RKPP dan FPR			1 dokumen	0 dokumen						
		Jumlah Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi			1 kali	1 kali						
		Jumlah pemantauan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang dan	Jumlah pemantauan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang dan			25 titik	40 titik						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah bulan pelaksanaan move	Jumlah bulan pelaksanaan move			12 bulan	12 bulan			APBD Kota	APBD Kota		50.000.000
		Jumlah Dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang			1 dokumen	1 dokumen						
		Jumlah pembahasan pelaksanaan penataan ruang	Jumlah pembahasan pelaksanaan penataan ruang			24 kali	24 kali			APBD Kota	APBD Kota		176.720.000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi			1 kali	1 kali						
		Jumlah Tenaga Harian Lepas	Jumlah Tenaga Harian Lepas			3 orang	3 orang						

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2021 disusun sebagai penyesuaian penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas PUPR Kota Cimahi menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan di tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke *level* terbawah.

Mengatasi perihal keterbatasan sumber daya dalam hal ini anggaran dari rencana-rencana yang ada kegiatan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran serta diupayakan dapat dilakukan proses pengadaan sedari awal tahun guna tercapainya keleluasaan masa pelaksanaan konstruksi di tahun berjalan sekaligus meminimalisir ketidaksesuaian dengan perencanaan. Upaya lain dalam menyiasati keterbatasan anggaran adalah dengan menentukan skala prioritas dari kebutuhan, rencana, dan usulan yang sudah terhimpun sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya.

Rencana tindak lanjut sebagai percepatan, jika ada kesalahan dan atau kurang tepatnya suatu hal yang terjadi pada penganggaran murni maka segera diusulkan pada anggaran perubahan parsial. Ketidaksesuaian dengan rencana di deteksi dan dievaluasi kontinyu dalam rentang waktu singkat sehingga dapat segera dibuat rencana baru sebagai penyesuaian kondisi dan kebutuhan dengan tetap pada koridor perencanaan makro. Pengalihan peruntukkan anggaran belanja bisa jadi menjadi solusi untuk optimalisasi anggaran dan tercapainya target output dan outcome yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Output Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Cimahi adalah penyesuaian program tahunan Dinas PUPR Kota Cimahi yang tetap menyesuaikan dengan tupoksi dan sasaran program Dinas PUPR Kota Cimahi. Renja Dinas PUPR Kota Cimahi ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 ini diharapkan akan meningkatkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan visi dan misi Wali Kota terpilih periode tahun 2017-2022.

Cimahi, September 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**



Ir. MEITY MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

